



LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.H.,M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	19
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si	20
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	26
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)	29
BAB III PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

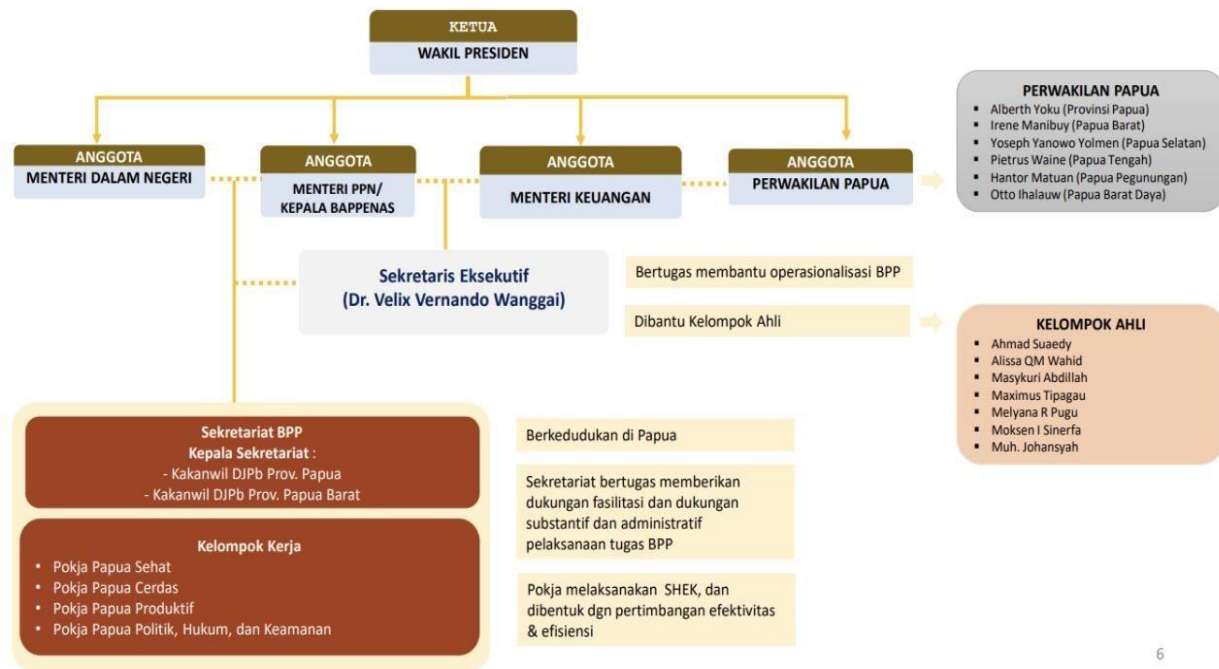
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;

- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.


BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan September tahun 2025 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan, S.IP.


Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI bersama Anggota BP3OKP di Jayapura
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Rabu, 17 September 2025, bertempat di Gedung Keuangan Negara, Jayapura.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat di Tanah Papua, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 2. Menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 3. Meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah serta memastikan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat Papua. 4. Memperkuat sinergi antara Wakil Presiden RI sebagai Ketua Dewan Pengarah Papua dan BP3OKP dalam memantau dan mengevaluasi kebijakan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Republik Indonesia – Bapak Gibran Rakabuming Raka • Seluruh Anggota Badan Pengarah Papua (BP3OKP) • Wamendagri Ibu Ribka Haluk
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP bersama Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Wakil Presiden RI meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri 2 Sentani. Program tersebut dinilai berjalan baik dan mendapat sambutan positif dari para siswa, guru, serta orang tua. BP3OKP mencatat bahwa program ini mendukung tujuan Otsus untuk memperbaiki gizi anak-anak Papua dan mendorong peningkatan kehadiran siswa di sekolah. 2. Koordinasi Pemerintah Daerah dan BP3OKP: Dalam sesi dialog singkat, Wakil Presiden meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi erat dengan BP3OKP dalam setiap pelaksanaan program Otsus agar hasilnya terukur dan berkelanjutan. BP3OKP juga menyampaikan laporan singkat tentang

		<p>hasil pengawasan dan tantangan pembangunan di wilayah pegunungan serta pesisir Papua.</p> <p>3. Arahan Wakil Presiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menekankan pentingnya transparansi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Mengingatkan agar program prioritas difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua (OAP). Mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. <p>4. Sinergi Pusat dan Daerah: Kegiatan ini memperkuat hubungan antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan instansi vertikal dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan dan menjamin keberlanjutan program nasional di Papua.</p>
Rencana Tindaklanjut	:	<p>1. Peningkatan Sinergi dan Koordinasi: BP3OKP bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu membentuk tim koordinasi lapangan untuk memastikan seluruh program Otsus berjalan sesuai target.</p> <p>2. Perluasan Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berhasil di SMP Negeri 2 Sentani perlu diperluas ke seluruh sekolah di wilayah Papua dan Papua Pegunungan agar manfaatnya merata.</p> <p>3. Penguatan Sistem Monitoring Otsus: BP3OKP diharapkan menyusun mekanisme pemantauan dan pelaporan terpadu guna memastikan setiap dana Otsus digunakan sesuai peruntukannya.</p> <p>4. Tindak Lanjut Kebijakan Pusat: Hasil kunjungan akan menjadi bahan rapat koordinasi lanjutan antara BP3OKP dan Sekretariat Wakil Presiden RI, guna menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan Papua tahap berikutnya.</p>
Dokumentasi Kegiatan	:	


Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa KONI Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 21 September 2025, bertempat di Baliem Pilamo Hotel
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memilih Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan secara sah sesuai dengan aturan organisasi KONI. 2. Menyusun arah dan langkah strategis pembangunan olahraga di wilayah Papua Pegunungan untuk dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. Widodo Sigit Pudijanto, SH, MH – Ketua Umum KONI Pusat • DR. Lukas Waika Kosai – Mewakili Gubernur Provinsi Papua Pegunungan • Ketua Carateker KONI Provinsi Papua Pegunungan • Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • Perwakilan Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) se- Provinsi Papua Pegunungan • Simpatisan dan pegiat olahraga dari berbagai kabupaten di wilayah Papua Pegunungan • Peserta Musorprovlub dan panitia penyelenggara
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah pembukaan, Ketua Carateker KONI memimpin pembahasan tata tertib Musorprovlub dan dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan sidang pleno. Sidang pleno berjalan dengan tertib dan demokratis, menghasilkan keputusan terpilihnya Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan yang baru, yaitu Bapak DR. (HC) John Tabo, SE., MBA. • Penetapan dan Penyerahan Keputusan: Pimpinan sidang pleno menyerahkan hasil keputusan Musorprovlub kepada Ketua Umum KONI Pusat, yang kemudian secara resmi mengumumkan dan menetapkan DR. (HC) John Tabo, SE., MBA sebagai Ketua KONI Provinsi Papua Pegunungan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Pemerintah Daerah: Diperlukan kerja sama strategis antara KONI Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten dalam hal pembiayaan, fasilitas olahraga, dan pengembangan sumber daya atlet. • Monitoring dan Evaluasi Berkala: KONI Papua Pegunungan diharapkan menyusun laporan kegiatan dan perkembangan atlet secara berkala kepada

		KONI Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan Bersama Kanwil Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Kamis, 18 September 2025, bertempat di Gedung Keuangan Negara, Jayapura.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas laporan kinerja anggota BPP Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, Pokja Papua Produktif, dan Pokja Papua Polhukam. 2. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja pokja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 3. Membahas kebutuhan penambahan anggota pokja guna meningkatkan efektivitas kinerja BPP Provinsi Papua Pegunungan. 4. Memperkuat koordinasi dengan Kanwil Papua untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP – Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • Tiga Staf Ahli Kanwil Papua yang menangani BPP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP selaku Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, melaporkan bahwa masih terdapat beberapa pokja yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga berdampak pada rendahnya serapan anggaran. • Ditemukan bahwa keterbatasan jumlah anggota pokja menjadi salah satu penyebab utama turunnya kinerja BPP Provinsi Papua Pegunungan. • Usulan penambahan anggota pokja baru telah diajukan dan masih menunggu proses tindak lanjut dari Setwapres.

		<ul style="list-style-type: none"> • Kanwil Papua menegaskan komitmen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pokja melalui laporan bulanan dan triwulanan. • Hambatan terkait proses administrasi di tingkat pusat disebabkan adanya kekosongan pejabat pada Bidang Deputi SDM Setwapres yang telah memasuki masa pensiun. • Pertemuan ditutup dengan penyampaian apresiasi dari Anggota BP3OKP Papua Pegunungan atas dukungan dan kerja sama Kanwil Papua.
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses pengesahan penambahan anggota pokja baru agar kinerja BPP dapat lebih optimal. 2. Melakukan evaluasi rutin terhadap setiap pokja untuk memastikan program kerja dapat berjalan sesuai rencana. 3. Meningkatkan koordinasi antara BP3OKP, Kanwil Papua, dan Setwapres dalam mengatasi hambatan administrasi. 4. Memaksimalkan serapan anggaran pokja dengan perencanaan kegiatan yang lebih terukur dan implementatif.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan ke Dinas DUKCAPIL Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Rabu, 24 September 2025, bertempat di Kantor Dinas DUKCAPIL Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan data Orang Asli Papua (OAP) di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. 2. Menyusun laporan yang akan disampaikan kepada Menteri Transmigrasi RI. 3. Menjadi dasar dalam pembahasan program bantuan perumahan rakyat bersama Kementerian Transmigrasi RI.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP – Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • Wolter Hese gem – Kepala Bidang Dinas Pencatatan Sipil Provinsi Papua Pegunungan • Kepala Bidang DUKCAPIL Provinsi Papua Pegunungan

		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pendataan Penduduk Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Data penduduk keseluruhan di Provinsi Papua Pegunungan adalah 822.158 jiwa. • Data Orang Asli Papua (OAP) yang diperoleh dari 8 Kabupaten adalah 91.249 jiwa. • Pihak Dukcapil menyampaikan bahwa data ini bersumber resmi dari dinas kependudukan di 8 Kabupaten. • Data yang diperoleh akan dijadikan bahan pembahasan pada pertemuan dengan Menteri Transmigrasi dan Dirjen Transmigrasi RI di Jakarta pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya koordinasi lanjutan antara BP3OKP dan Dinas Dukcapil dalam rangka pemutakhiran data untuk mendukung program pembangunan, khususnya perumahan rakyat bagi OAP. 2. Mengoptimalkan kerja sama lintas sektor dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama Orang Asli Papua di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Pembahasan Kajian Rencana Pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 23 September, 2025 bertempat di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Perindakop) Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas kajian rencana pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya. 2. Mengidentifikasi permasalahan ketersediaan pakan ternak di Provinsi Papua Pegunungan.

		<p>3. Mendorong program pembangunan pabrik pakan ternak sebagai solusi atas tingginya biaya transportasi dan harga pakan dari luar daerah.</p> <p>4. Mensinergikan peran BP3OKP dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Perindakop untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi lokal.</p>
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP – Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • Alpius Yigibalom, S.H. – Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Pegunungan • Kepala Bidang Perindakop Provinsi Papua Pegunungan beserta tim teknis
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	BP3OKP bersama seluruh Pokja
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Dinas Perindakop menjelaskan bahwa kelompok pertanian dan peternakan di Papua Pegunungan menghadapi kendala mahal nya biaya transportasi pasokan pakan dari luar Wamena, sehingga harga pakan tinggi dan menyulitkan peternak. • Tingginya harga pakan berdampak langsung pada naiknya harga daging unggas dan telur, serta mendorong inflasi di Papua Pegunungan. • Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Perindakop berencana membangun Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya sebagai solusi untuk menekan biaya produksi, mendukung peternak lokal, serta mengendalikan inflasi.
Rencana Tindakan lanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. BP3OKP dan Dinas Perindakop bersama-sama melakukan advokasi ke kementerian/lembaga terkait di Jakarta untuk mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan. 2. Menyusun roadmap pembangunan pabrik pakan ternak dengan melibatkan stakeholder terkait, termasuk kelompok peternak lokal. 3. Memastikan pembangunan pabrik pakan ternak menjadi salah satu program prioritas dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Papua Pegunungan. 4. Memperkuat sinergi antara BP3OKP, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dokumentasi Kegiatan	:	


Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Penyerahan Dokumen Pengusulan Anggota Pokja dan Dokumen Pembangunan Pabrik Pakan Ternak ke Setwapres oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Selasa, 30 September 2025, bertempat di Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan dokumen pengusulan penambahan anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. 2. Menyerahkan dokumen dari Dinas Perindakop Provinsi Papua Pegunungan terkait rencana pembangunan Pabrik Pakan Ternak di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya. 3. Melaksanakan tugas dan fungsi BP3OKP dalam bidang Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan Setwapres.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP – Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan • Setwapres
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pengusulan anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan telah diserahkan secara resmi kepada staf Setwapres. • Hantor Matuan, S.IP menyampaikan bahwa penambahan anggota Pokja sangat mendesak karena kondisi geografis Papua Pegunungan menyebabkan 4 anggota pokja yang ada saat ini tidak mampu bekerja maksimal. • Staf Setwapres menyatakan kesediaan untuk memproses dan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setwapres diharapkan segera memproses pengusulan penambahan anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan agar kinerja kelembagaan dapat lebih optimal. 2. Diperlukan dukungan penuh dari pemerintah pusat agar aspirasi masyarakat Papua Pegunungan dapat terealisasi secara konkret dalam waktu dekat. 3. BP3OKP harus terus melakukan fungsi SHEK dalam mengawal program-program strategis di Provinsi Papua Pegunungan.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025–2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Rabu, 3 September 2025, bertempat di
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun RPJMD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan daerah. • Menyatukan visi, misi, dan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. • Menampung usulan program pembangunan dari 8 kabupaten agar sesuai dengan sasaran pembangunan provinsi.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • John Tabo – Gubernur Provinsi Papua Pegunungan • Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan • Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Bupati dan Wakil Bupati dari 8 Kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Jayawijaya • Kabupaten Lanny Jaya • Kabupaten Pegunungan Bintang • Kabupaten Mamberamo Tengah • Kabupaten Nduga • Kabupaten Tolikara • Kabupaten Yahukimo • Kabupaten Yalimo • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Pegunungan • Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Provinsi Papua Pegunungan • Perwakilan OPD dari 8 Kabupaten se-Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK


Misi/Keterangan	:	BP3OKP bersama Pokja Papua Sehat dan Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> Gubernur John Tabo menegaskan pentingnya sinergi visi dan misi antara gubernur–wakil gubernur dengan bupati–wakil bupati dari 8 kabupaten dalam menyatukan arah pembangunan. RPJMD ditetapkan sebagai dokumen strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program terarah dan terukur. Usulan program pembangunan dari 8 kabupaten telah disampaikan sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi Papua Pegunungan. Fokus pembangunan diarahkan pada tiga bidang utama: <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pengelolaan potensi ekonomi lokal Penguatan infrastruktur wilayah
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan RPJMD 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan resmi pembangunan daerah. Melakukan sinkronisasi antara program provinsi dan program kabupaten agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Menindaklanjuti usulan program dari 8 kabupaten melalui pengkajian teknis dan penganggaran yang terukur. Memperkuat koordinasi lintas OPD di provinsi maupun kabupaten untuk memastikan implementasi program berjalan efektif.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 8		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) BPP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 15 September 2025, bertempat di Aula KPPN Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan Pokja BPP Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan laporan triwulan III.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kendala penurunan kinerja serta mencari solusi perbaikan ke depan. • Menyusun rencana kerja dan penguatan koordinasi dengan instansi terkait.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hantor Matuan, S.IP – Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan / Ketua BPP • Kasubag Umum KPPN Wamena (Suhaiba) – Sekretariat BPP • Anggota Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam (Damai)
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebab utama: belum adanya program terencana, kurangnya proposal kegiatan, lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, serta kegiatan tanpa dasar proposal dan surat tugas. • Anggota BPP menegaskan perlunya keseriusan anggota Pokja dalam membuat perencanaan, proposal kegiatan, serta koordinasi untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK). • Anggota Pokja menyoroti berbagai kendala: keterbatasan anggota, sulitnya bertemu pejabat OPD, serta minimnya dukungan pemerintah daerah. • Disepakati bahwa masing-masing Pokja wajib menyusun rencana kerja dan menyerahkannya paling lambat Jumat, 19 September 2025.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap Pokja segera membuat perencanaan kegiatan, proposal, dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. • Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan peningkatan capaian laporan kinerja pada triwulan berikutnya.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan


Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Pokja Papua Pegunungan Polhukam ke SMA YPPK Santo Tomas Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari kamis, 25 september 2025 bertempat di SMA YPPK Santo Thomas Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan penerapan pencegahan anti-rasisme, penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas di kalangan pelajar
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pokja Papua Polhukam • Anak-anak dan guru-guru SMA YPPK Santo Thomas Wamena • Kasat Narkoba Polres Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Polhukam
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Teridentifikasi tantangan anti-rasisme, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dikalangan pelajar. - Kasat Narkoba Polres Jayawijaya bersama Pokja Papua Polkuham mengajak pelajar agar kedepannya bisa lebih mawas diri dikala maraknya kasus rasisme, pergaulan bebas, narkoba dan berharap pemerintah pusat dapat membantu memfasilitasi faktor-faktor yang diperlukan guna mendukung peningkatan penerapan pencegahan rasisme, pergaulan bebas dan narkoba. - Pokja Papua Polhukam memberikan apresiasi atas kinerja SMA YPPK Santo Thomas Wamena dan Polres Jayawijaya serta berkomitmen menyalurkan aspirasi ke pusat. - disepakati pentingnya komunikasi dan kerjasama berkelanjutan demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kalangan pelajar.
Dokumentasi Kegiatan	:	


2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Audiensi dan Koordinasi Persiapan SDM Koperasi Merah Putih, MBG dan Pelaku Ekonomi Orang Asli Papua di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Selasa, 16 September 2025, bertempat di Ruang Kepala Staf Ahli Bidang SDM, Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menggali hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekonomi di tingkat distrik dan kampung di seluruh wilayah 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. • Menyusun langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi masyarakat, dan penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Aaron Wanimbo, Kepala Staf Ahli Bidang SDM, Kantor Gubernur Prov. Papua Pegunungan • Perwakilan BP3OKP - Papua Produktif • Tim Koordinasi Persiapan Program Koperasi Merah Putih dan MBG • Pendamping dan pelaku usaha ekonomi OAP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi.
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan SDM Masih Terbatas Teridentifikasi bahwa SDM dalam pelaksanaan program seperti Koperasi Merah Putih dan MBG di 8 kabupaten Prov. PP masih belum memadai. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program di tingkat distrik dan kampung. 2. Belum Maksimalnya Peran Pejabat K/L di Daerah Pejabat dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di wilayah 8 kabupaten juga belum optimal dalam mendistribusikan dan mengimplementasikan program-program ekonomi produktif ke seluruh distrik dan kampung. 3. Minimnya Fasilitas Peningkatan SDM Diperoleh fakta bahwa pemerintah Prov. PP belum maksimal dalam melakukan pelatihan, pembinaan, serta penyediaan fasilitas seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan

		modal usaha bagi pelaku usaha OAP, yang menyebabkan rendahnya kesiapan dan daya saing SDM lokal.
Rencana Tindakan lanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Aksi SDM OAP Pemerintah provinsi perlu segera menyusun rencana aksi khusus peningkatan SDM pelaku usaha ekonomi OAP, termasuk kurikulum pelatihan, pelibatan lembaga pelatihan, dan mitra kerja. 2. Pendirian BLK di Setiap Kabupaten Mendesak untuk membangun atau mengaktifkan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap kabupaten sebagai pusat peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi masyarakat lokal.
Dokumentasi Kegiatan	:	


Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Festival Panggung Musik Reggae, Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di menara Tugu Salib, Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 bertempat di Menara Tugu Salib, Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kegiatan perekonomian yang selama ini perputaran uang di wamena masih sangat kecil . • Memberi kesempatan para pelaku usaha musik, fashion, pelaku ekraf dan umkm lainya untuk tampil aktif dan kreatif disetiap event yang diprogramkan oleh pemerintah daerah.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Asisten II Kabupaten Jayawijaya • Pokja Papua Produktif BP3OKP • Kadis Perindagkop • Seniman • Pelaku Ekraf dan Umkm
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif

Hasil Kegiatan	:	Program hasil kegiatan ini akan di koordinasikan dan selalu akan dievaluasi oleh opd setempat agar kedepan bisa lebih aktif dan bisa membawa perubahan ekonomi dan hiburan untuk kota wamena
Rencana Tindaklanjuti	:	Kegiatan program festival ini akan dikoordinasikan dengan pemda dan dinas terkait agar iven kegiatan ini menjadi kegiatan rutinitas setiap 2 atau 3 bulan sekali
Dokumentasi Kegiatan	:	


Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Program MBG antara semua dapur MBG dengan Para Pelaku Usaha UMKM dan Ekraf Pertanian Orang Asli Papua di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 25 September 2025, bertempat di Kantor BGN/ dapur MBG, jl. Bhayangkara, Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan MBG antara pengurus dapur MBG dan para pelaku usaha penyuplai bahan pokok dapur MBG. • Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi bagi para pelaku usaha UMKM dan Ekraf pertanian. • Membantu mensukseskan program MBG di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan BGN • Kepala Dapur MBG • Pimpinan Bank Mandiri • Pelaku Umkm / Ekraf Pertanian, Pelaku Usaha Sembako Dan Mitra Dapur MBG
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Mendorong dan Koordinasi agar kedepan para pelaku usaha pertanian dalam hal ini kelompok tani sayur, ikan, ternak dan sembako agar langsung bisa mensuplai hasil panennya ke dapur MBG dengan jumlah, jenis dan kualitas yang telah ditetapkan.
Rencana Tindaklanjuti	:	Program Nasional MBG dan kerjasama ini akan di Koordinasikan, di Laporkan dan di Evaluasi kepada

		Pemerintah daerah agar kerjasama dengan Pemerintah, Pimpinan BGN dan pelaku usaha bisa berjalan mulai dari kampung, distrik dan 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Awal Program Inpres Rencana Pembangunan Rumah 2.200 Unit Untuk 8 Kabupaten Di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 17 September 2025 bertempat di Ruang Kerja Kabid Perumahan Kantor Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Koordinasi dengan pemda dalam hal ini instansi terkait untuk persiapan pembangunan rumah 2.200 unit • Kontrol dan Koordinasi jumlah kuota untuk masing Kabupaten. • Menentukan tahapan lelang dan pelaku kontraktor OAP
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Perumahan Dan Staff PUPR Kantor PUPR • Pokja Papua Produktif
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Awal Terkait Kuota Pembangunan Rumah Telah dilakukan diskusi dan pemetaan awal terkait alokasi kuota pembangunan rumah Inpres sebanyak 2.200 unit yang akan dibagi ke 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kemiskinan ekstrem, dan ketersediaan lahan di masing-masing kabupaten. 2. Identifikasi Pelaku Pembangunan dari Kalangan OAP (Orang Asli Papua) Disepakati bahwa pelaksanaan pembangunan rumah akan mendorong pelibatan kontraktor OAP, baik sebagai pelaku utama maupun mitra kerja, untuk mendukung


		<p>peningkatan kapasitas ekonomi dan pemberdayaan SDM lokal.</p> <p>3. Pemetaan Penerima Manfaat dan Lokasi Prioritas Dinas PUPR Prov. PP bersama tim teknis mulai menyusun verifikasi data masyarakat yang menjadi sasaran utama program, terutama mereka yang belum memiliki rumah dan berada di wilayah pelosok serta berstatus ekonomi lemah.</p>
Rencana Tindaklanjut	:	<p>1. Sosialisasi Program kepada Masyarakat dan Kontraktor Lokal Perlu dilakukan sosialisasi massif kepada calon penerima manfaat serta pelaku usaha (kontraktor), khususnya OAP, agar mereka siap mengikuti proses sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Pendampingan Teknis dan Administratif bagi Kontraktor OAP, Diperlukan pelatihan dan pendampingan khusus bagi kontraktor OAP agar mereka mampu bersaing dan menjalankan pekerjaan sesuai standar teknis dan waktu pelaksanaan.</p>
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Pendampingan dan Koordinasi pada kegiatan Musorprovlub (Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa) Koni Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada 21 September 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Monitoring dan Koordinasi tahapan – tahapan yang harus dijalankan dalam Musorprovlub Pemilihan ketua umum KONI dalam hal ini bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. • Mendorong Olahraga sebagai Industri Ekonomi / Sport Prenuer dan menjaring para pemimpin Cabor yang ada di Provinsi Papua Pegunungan


		<ul style="list-style-type: none"> • Mensinkronkan dan Evaluasi untuk mencari SDM, atlet prestasi dan menjadikan Provinsi Papua Pegunungan menjadi lumbung produktif untuk atlet prestasi jangka 25ndustr sesuai RIPP dan RAPP.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur • Ketua dan Pengurus Caretaker Koni Provinsi Papua Pegunungan • Ketua Koni 8 Kabupaten • Asisten III Jayawijaya • Kepala OPD • 24 Ketua Cabor Tamu Undangan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memilih dan mengangkat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan untuk menjadi ketua umum dan pemimpin tinggi cabang olahraga. • Memberikan kesempatan kepada pemimpin muda Cabor OAP untuk bisa membawa dan mencetak SDM, atlet dan pelatih cabor yang prestasi serta unggul.
Rencana Tindakanlanjutan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi agar Papua Pegunungan dalam jangka 25ndustr menjadi lumbung atlet prestasi dan 25ndustry olahraga ekonomi yang unggul dan menguntungkan. • Menjadikan atlet prestasi Cabor di Provinsi Papua Pegunungan bisa merubah kehidupan ekonomi OAP
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Paul Wetipo, S.Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Pokja Papua Cerdas melaksanakan Pelatihan Guru SD: Penggunaan Buku Paket Kontekstual Papua.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Rabu, 24 September 2025, bertempat di SD YPPGI Napua, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan kepada guru-guru Sekolah Dasar (kelas I, II, dan III) tentang cara penggunaan Buku Paket Kontekstual Papua (BPKP) sebagai media pembelajaran literasi dasar. 2. Meningkatkan kapasitas guru dalam pendekatan kontekstual yang sesuai dengan budaya, lingkungan, dan kondisi masyarakat Papua Pegunungan. 3. Mendukung program nasional dan daerah dalam penuntasan buta aksara dan peningkatan kemampuan membaca dan menulis siswa di daerah tertinggal, terisolir, dan terbelakang (3T).
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Guru-guru kelas I, II, dan III dari 5 Sekolah Dasar di Kabupaten Jayawijaya • Narasumber utama: Ny. Netha Valentin Boseran, M.Ed (EC) – penulis dan pelatih BPKP • Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya: Bapak Larius Tabuni, S.Pd, M.Pd • Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP: Bapak Paul Wetipo, S.Pd • Panitia penyelenggara dan Tim Yayasan Kristen Wamena (YKW)
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan Buku Paket Kontekstual Papua (BPKP): latar belakang, tujuan, serta struktur buku • Latihan pengajaran berbasis konteks lokal, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penggunaan huruf dan bunyi dalam konteks Papua ○ Proses dasar membaca dan menulis ○ Penanganan kelas dan penggunaan alat peraga buatan sendiri • Pemahaman tentang peran guru sebagai pendidik karakter dan pengembang potensi siswa • Diskusi & praktik langsung dengan pendekatan "percaya bahwa siswa bisa"

		<ul style="list-style-type: none"> • Motivasi dan penguatan peran guru sebagai pilar masa depan pendidikan Papua Pegunungan
Rencana Tindaklanjuti	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Replikasi Pelatihan ke distrik dan sekolah lain di wilayah Kabupaten Jayawijaya dan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan. 2. Integrasi Buku Paket Kontekstual Papua (BPKP) ke dalam pembelajaran di kelas rendah secara berkelanjutan. 3. Penerbitan dan distribusi BPKP secara luas, terutama untuk wilayah 3T. 4. Pelatihan lanjutan dan pendampingan guru secara berkala, termasuk penyediaan bahan ajar dan alat peraga lokal. 5. Evaluasi berkala terhadap dampak penggunaan BPKP terhadap peningkatan literasi siswa. 6. Kolaborasi lintas sektor (BP3OKP, Dinas Pendidikan, YKW, dan sekolah) dalam mendukung program literasi kontekstual berbasis budaya lokal
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Bersama Akademisi: Penyusunan Master Plan Pendidikan di Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Jumat, 29 September 2025.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan merumuskan kerangka awal Master Plan Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. 2. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi pengembangan pendidikan dasar yang kontekstual dan berkelanjutan. 3. Mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan pendidikan di 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

		4. Menyusun kalender kerja Tim Master Plan Pendidikan untuk tahap perencanaan hingga implementasi.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Agus Sumule (akademisi dan narasumber utama) • Perwakilan BP3OKP Pokja Papua Cerdas
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Disepakati sasaran utama pengembangan pendidikan dasar, antara lain: peningkatan akses layanan, mutu guru, kurikulum kontekstual, serta penguatan karakter dan budaya lokal. • Diidentifikasi tantangan utama pendidikan di 8 kabupaten, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi dasar, kekurangan guru terlatih, dan minimnya bahan ajar lokal.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Penjadwalan rapat lanjutan dan workshop teknis untuk memperdalam strategi implementasi. • Koordinasi lintas sektor agar dokumen Master Plan terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Kerja Anggota BP3OKP Pokja Papua Sehat Ke RSUD Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada Jumat, 19 September 2025, bertempat di Ruang Kerja Direktur RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti hasil rapat bersama JKN dan BPS terkait implementasi BPJS, JKN, dan KIS di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. • Melihat secara langsung kondisi pelayanan dan fasilitas RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan utama dari 8 Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. • Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi rumah sakit dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M. – Anggota BP3OKP Pokja Papua Sehat • dr. Charles C.R., Sp. Og. – Direktur RSUD Wamena • Staf dan perawat RSUD Wamena • Tim pendukung Pokja Papua Sehat
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan Administrasi Kependudukan: Banyak masyarakat belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga tidak dapat terdaftar sebagai peserta BPJS. Hal ini menyebabkan pasien tanpa identitas resmi harus membayar biaya perawatan secara mandiri. Ditemukan juga penggunaan data kependudukan yang tidak valid (misalnya BPJS atas nama orang yang sudah meninggal atau milik orang lain), yang menghambat pelayanan kesehatan. • Permasalahan Pembiayaan: Sebagian besar biaya pelayanan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sementara dukungan dari tujuh kabupaten lainnya masih sangat minim. Pemerintah Kabupaten Nduga telah menandatangani MOU dengan RSUD Wamena senilai Rp 1 miliar, namun hingga saat ini dana tersebut belum terealisasi. • Rencana Pengembangan RSUD Wamena: Pihak rumah sakit berencana membangun gedung tiga lantai untuk ruang anak serta mengembangkan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dengan fasilitas empat tempat

		<p>tidur, satu kamar mandi, dan satu AC per ruangan untuk meningkatkan kenyamanan pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresiasi dan Komitmen BP3OKP: Gaad P. Tabuni, SP., M.M., memberikan apresiasi atas dedikasi tenaga kesehatan RSUD Wamena yang tetap bekerja maksimal meskipun menghadapi keterbatasan. Beliau menegaskan komitmen BP3OKP Pokja Papua Sehat untuk menyuarakan persoalan pendataan OAP dan pembiayaan RSUD Wamena kepada pemerintah daerah dan pusat.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan OAP: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Bupati di 8 Kabupaten perlu melakukan pendataan penduduk secara akurat agar seluruh masyarakat mendapatkan hak layanan BPJS. • Peningkatan Dukungan Antar Kabupaten: Perlu adanya pembagian tanggung jawab pembiayaan antar kabupaten di wilayah Papua Pegunungan untuk meringankan beban RSUD Wamena. • Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit: Pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung pengembangan ruang anak dan pembangunan KRIS sebagai solusi atas keterbatasan ruang rawat inap. • Sosialisasi dan Koordinasi Lanjutan: BP3OKP Pokja Papua Sehat akan menyampaikan hasil temuan ini dalam kunjungan kerja ke masing-masing kabupaten serta melakukan koordinasi lintas sektor untuk percepatan perbaikan sistem
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Rabu, 3 September 2025, bertempat di Baliem Pilamo Hotel Wamena


Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan Fungsi SHEK BP3OKP dalam Percepatan implementasi RIPP dan RAPP Perencanaan Pembangunan Program Kerja Prioritas K/L Pusat terintegrasi dengan Program Pemerintah Provinsi dan 8 Kabupaten Pupa Pegunungan. 2. Mendorong terwujudnya Percepatan Pembangunan yang terkandung searah Visi dan Misi BP3OKP berfokus SHEK membangun kualitas SDM OAP yang Sehat, Cerdas, Kreatif dan Damai. 3. Menjadi nara sumber dalam Musrembang.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Otda Kementrian Dalam Negeri • Gubernur dan Pejabat teras dan Perangkat OPD Provinsi • Anggota BPP dan Pokja BP3OKP • Pimpinan K/L dan Forkompinda di Propinsi Papua Pegunungan • Ketua MRP dan Anggota • Ketua DPRP dan anggota • 8 Bupati dan Kepala OPD se Prov. Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Program wajib by Data valid jumlah OAP Papua Pegunungan sebagai sasaran Subjek dn Objek Pembangunan • Memprioritaskan Program Pembangunan Rumah Sakit Umum rujukan Wilayah Lapago Provinsi Papua Pegunungan di Wamena • Keterlibatan tugas dan fungsi SHEK BP3OKP terhadap mekanisme seluruh aspek proses pembangunan berbasis pembiayaan Otsus Papua
Rencana Tindakanjutan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas dan fungsi SHEK terhadap OPD terkait dalam Penyusunan RPJMD, RENSRA dan RENJA serta SPM di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemda 8 Kabupaten se Provinsi Papua Pegunungan 2. Percepatan Pendataan OAP Provinsi Papua Pegunungan melalui SHEK bersama MRP, DPRP, Gubernur dan Bupati se Provinsi Papua berbasis Perdasi dan Perdasus. 3. Mempercepat Muster Plan dan Rencana Aksi Pembangunan RSUP 4. Mengawal dan menaruh perhatian khusus berdasarkan SHEK terhadap pembangunan Provinsi dan 8 Kabupaten se Prov. PP.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Program JKN BPJS bersama Deputi Regional XII Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Selasa, 2 September 2025, bertempat di Ruang Rapat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> Mengevaluasi Implementasi Program JKN BPJS di 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan dengan permasalahan yang dihadapi dan Sosialisasi Program Kerja dan Strategi kebijakan Peningkatan pengembangan JKN BPS demi kesehatan masyarakat umum dan khususnya Penduduk OAP ke depan melalui jaminan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <u>Pemerintah Provinsi :</u> <ol style="list-style-type: none"> Asisten II Sekda Provinsi (Mwkl Gubernur) Sekpri Gubernur Kadin Kesehatan Provinsi Kadin Keuangan Provinsi Direktur RSUD Wamena Pokja Papua Sehat BP3OKP <u>BPJS Kabupaten Jayawijaya:</u> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Kantor BPJS Kabupaten Jayawijaya 5 orang Staf BPJS Kabupaten Jayawijaya <u>Tim Deputi Wilayah XII Papua (6 Provinsi di Tanah Papua Raya)</u> <ol style="list-style-type: none"> Deputi BPJS Wilayah XII Papua Direksi Deputi 4 orang Staf Deputi 4 orang
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi, Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat

Hasil Kegiatan	:	<p>Hasil Evaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi sangat jelas dan hasil kinerja sebagian besar Puskesmas belum mencapai serapan Capitasi/bulan pembiayaan JKN dan BPJS rendah, kecuali Wamena Kota terserap Rp.400.000.000 per bulan Sedangkan klaim BPJS di RSUD Wamena lancar namun fluktuasi 2 s.d 3 milyar /tahun, sedangkan 7 kabupaten lainnya masih fluktuasi rendah 2. Mengetahui realisasi dana kesehatan berbasis Kartu BPJS dan JKN masih rendah di 7 kabupaten, karena kekurangan SDM, minimnya ketersediaan sarana Prasarana kesehatan. 3. Persoalan mendasar dalam layanan JKN BPJS bagi masyarakat adalah sebagian besar penduduk belum memiliki NIK KTP sebagai dasar dalam penerbitan JKN BPJS.
Rencana Tindakan lanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tugas fungsi SHEK melalui kebijakan bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam pelayanan proses pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan SKPD Kesehatan dan Pimpinan Pelaksana lapangan dalam implementasi pelayanannya 3. Peningkatan rapat teknis dan evaluasi berkala terencana
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya 2025 – 2030
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Jumat, 26 September 2025, bertempat di Ruang Kerja Sekda Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Sinkronisasi Proses Musrembang RPJMD, RENSRA dan RENJA Kabupaten Jayawijaya Tahun 2025 - 2030
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pokja Papua Sehat BP3OKP • Staf BP3OKP • Sekda Kabupaten Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi


Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan RPMD, RENSRA, RENJA dan inklusif di bidang Kesehatan dengan 12 indikator SPM dengan sasaran utama Penduduk OAP sedang dalam proses finalisasi. 2. Strategi pelaksanaan pembangunan dimulai berbasis dari Posyandu di tingkat 328 Kampung dan penanganan kesehatan 40 Puskesmas melalui sistem mobil berbasis pemusatan 10 Puskesmas kewilayaan. 3. Diprioritaskan pengembangan kuantitas dan kualita SDM kesehatan Tenaga Keshatan Perawat sampai dokter spesialis dengan kelengkaapan sasaran dan prasarana.
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen kelanjutan SHEK dalam setiap kesempatan 2. Diarahkan Sekda berkolaborasi dengan SKPD terkait 3. Tembusan Laporan Otsus akan rutin kepada BP3OKP
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Pokja Papua Sehat ke SMK Kesehatan Elisa Gobay Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 29 September 2025, bertempat di Ruang Kantor SMK Kesehatan Elisa Gobay
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Koordinasi kepada Kepala SMK Kesehatan Elisa Gobay Wamena di Sinakma Distrik Wamena.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pokja Papua Sehat • Kepala SMK Kesehatan EG • 2 orang staf BP3OKP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK Pokja Papua Sehat, dalam Memahami Eksistensi, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dan Proses Penyelenggaraa SMK Kesehatan Elisa Gobai Wamena sebagai Lembaga Pendidikan Kesehaatan Swasta di kelola Swadaya OAP

Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat Kesehatan dalam Tusi pengarahan dalam pembangunan SDM OAP dalam bidang Pendidikan Kesehatan
Hasil Kegiatan	:	<p>Hasil kegiatan melalui Koordinasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidiri: Bpk Yance Gobai, ST. • Visi: Menjangkau dunia bagi Kristus melalui program yayasan pendidikan Sinar Kasih Kemah Injil PP <p>Dan Misi: Mengembangkan Pendidikan Peduli Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan, Peduli Kesehatan dan Peelstarian lingkungan Budaya Asli Papua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan: Pengembangan Pendidikan Kesehatan berkelanjutan satu atap: Pauda, SD, SMP, SMK hingga Perguruan Tinggi, direncanakan sejak tahun 2023 dan sudah mulai tahun 2025 dengan kepastian hukum ijin operasinal penyelenggaraan Pendidikan dari pihak Pemerintah berkompeten. • Lokasi: Sementara di SD YPPGI Anigou Sinakma. Saat ini sedang mencari tanah lokasi SMK. • SMK sudah dimulai Bulan Agustus 2025 dengan jumlah siswa 23 orang, dengan Tenaga Guru 12 orang. Fasilitas sekolah sementara dipinjamkan dari SD YPPGI Anigou Sinakma dengan waktu sekolah siang dimulai Jam 13.00 siang • Sesgala sesuatunya dalam tahap permulaan dengan komitmen kami bersama Tuhan kami bisa. • Harapan kami SMK, Pihak pemerintah bisa memperhatikan kami, termasuk Bapak Ibu BP3OKP, karena SMK Kesehatan ini baru pertama kami mulai terdesak, karena keprihatinan kami terhadap kondisikesehatan masyarakat OAP yang sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang berkompetensi.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Ke depan, sesuai Tusi pengarah percepatan Pokja Papua Sehat, akan tetap membangun koordinasi dalam perkembangan SMK Kesehatan ini. • Pokja Papua Sehat BP3OKP sesuai Tusi SHEK membangun koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten. • Disarankan Pimpinan SMK Kesehatan memiliki data yang standart berbentuk Proposal mengenai SMK ini dan disampaikan kepada Pemerintah dan berbagai Pihak yang peduli terhadap pendidikan kesehatan. • Diharapkan upaya untuk lokasi tanah, agar diprioritaskan dan jika dapat ditempat yang strategis dan aman. • Disarankan rekrutmen guru diutamakan SDM yang berlatar pendidikan/pengalaman kesehatan.

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Audiensi dan Koordinasi Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dengan Tim Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Kamis, 25 September 2025, bertempat di SPPG MBG Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan eksistensi dan tupoksi BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan serta peran SHEK dalam percepatan implementasi program MBG. • Melaksanakan audiensi dengan Koordinator dan Tim Pelaksana MBG terkait strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian sasaran program. • Membangun koordinasi dan kerja sama dalam sosialisasi program MBG guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. • Mendorong percepatan pelaksanaan program MBG agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat setempat.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Gaad Piranid Tabuni – Pokja Papua Sehat • Teo A. Dini – Staf BPP Papua Pegunungan • Deni Harianto - Sekretariat BPP Papua Pegunungan • Achmad Suhaiba – Sekretariat BPP Papua Pegunungan • Muhammad Devan Pratama – Sekretariat BPP Papua Pegunungan • Meisly Mariana Kombong – Staf BPP Papua Pegunungan • Koordinator MBG Kabupaten Jayawijaya • Tim MBG Kabupaten Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana koordinasi awal antara Pokja Papua Sehat BP3OKP dengan Koordinator dan Tim MBG Kabupaten Jayawijaya. • Tercapai pemahaman bersama terkait peran BP3OKP dalam mendukung implementasi program MBG melalui fungsi SHEK.

		<ul style="list-style-type: none"> • Disepakati pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan tim pelaksana MBG. • Teridentifikasi tantangan dalam pelaksanaan program, terutama terkait keterlibatan masyarakat dan efektivitas distribusi makanan bergizi
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penyusunan rencana kerja bersama Pokja Papua Sehat dan Tim MBG untuk mempercepat implementasi program. • Dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman pentingnya program MBG. • Diperlukan monitoring dan evaluasi rutin untuk mengukur capaian program serta dampaknya bagi masyarakat OAP. • Mengusulkan dukungan tambahan dari pemerintah provinsi dan kabupaten agar program MBG lebih optimal menjangkau masyarakat di pelosok.
Dokumentasi Kegiatan	:	

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 8 Oktober 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



HANTOR MATUAN, S.IP